Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

TAHUN 2021



Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam mencapai tujuan dan sasaran strateginya. Disamping itu, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 ini juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 ini adalah tahun pertama dari pelaksanaan Renstra SKPD 2021 - 2026 dan sebagai pijakan/langkah untuk pelaksanaan kinerja yang akan datang. Segala keberhasilan pembangunan pada pelaksanaan Renstra yang lalu di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tidak terlepas dari perhatian, bantuan dan kerja keras semua pihak mulai dari jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat yang telah bersamasama mendukung pelaksanaan program-program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru. Kami berharap bahwa segala program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya. Kami menyadari bahwa apa yang di sajikan masih jauh dari sempurna, namun kami berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mambantu dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 ini.

Banjarbaru, Pebruari 2022

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT

Pembina

NIP. 19730727 199803 2 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021 ini disusun. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dan juga sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja. Selain itu Laporan Kinerja ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru adalah 5 (lima) sasaran berkategori *Melebihi Target* dan 6 (enam) sasaran berkategori *Sesuai*. Dengan demikian rata-rata capaian sasaran keseluruhan berkategori *Melebihi Target*.

Capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

No	Nama Sasaran	Penanggung Jawab	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	- Bidang Sumber Daya Air	100,60	Melebihi Target
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- Bidang Cipta Karya	100,62	Melebihi Target
3	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Bidang Cipta Karya	100	Mencapai Terget
4	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	- Bidang Cipta Karya dan Bidang Bina Marga	100,21	Melebihi Target
5	Meningkatkan Pengembangan Permukiman	- Bidang Cipta Karya	100	Mencapai Terget
6	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung	- Bidang Cipta Karya	100	Mencapai Terget
7	Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	- Bidang Cipta Karya	100	Mencapai Terget
8	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan	- Bidang Bina Marga	100,07	Mencapai Terget
9	Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi	- Bidang Pengembangan Konstruksi	100	Mencapai Terget
10	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	- Bidang Tata Ruang	101,81	Melebihi Target

No	Nama Sasaran	Penanggung Jawab	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
11	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragam Hayati	- Bidang Tata Ruang	100	Mencapai Terget
- Rat	- Rata-rata Capaian Kinerja (%)			Melebihi Target

DAFTAR ISI

KATA I	PENGANTAR	i
IKHTIS	SAR EKSEKUTIF	iii
DAFTA	AR ISI	vi
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang B. Gambaran Umum SKPD C. Tugas dan Fungsi D. Aspek Strategis Organisasi E. Isu Strategis F. Landasan Hukum G. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA A. Tujuan Dan Sasaran B. Indikator Kinerja Utama SKPD C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
BAB II	II : AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Tahun 2021	
BAB I\	V: PENUTUP	
	A. Kesimpulan B. Langkah di Masa Datang	
LAMPI	PIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarbaru, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan

dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempuntai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

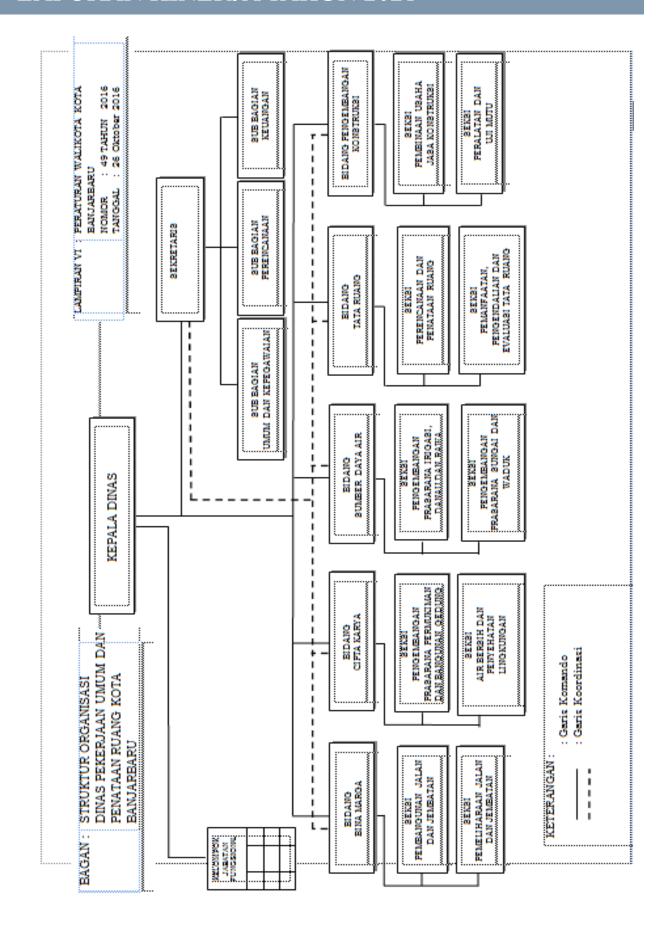
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri daerah:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa;
 - 2. Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk.
- d. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Tata Ruang terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang.
- g. Bidang Pengembangan Konstruksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Peralatan dan Uji Mutu.



D. Aspek Strategis Organisasi

Dalam upaya merealisasikan pemerintah yang baik (Good Governance), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diperlukan strategi. Strategi disusun dengan mengacu tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bidang Sumber Daya Air

- Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan sarana irigasi yang telah dibangun.
- Meminimalkan dampak akibat daya rusak air.

2. Bidang Bina Marga

- Menjamin tetap lancarnya prasarana perhubungan didalam pelayanan jalan dan jembatan sehingga dapat selalu melayani kebutuhan lalu lintas sesuai volume yang terus berkembang.
- Mengurangi jalan-jalan kota dalam kondisi rusak dan rusak berat dan berusaha meningkatkan panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang.
- Membangun jalan baru dan membuka konektivitas jalan dalam rangka mengimbangi pertumbuhan lalu lintas dan perkembangan wilayah.

3. Bidang Cipta Karya

- Meningkatkan akses air minum yang aman.
- Meningkatkan akses sanitasi yang bersih dan sehat.
- Meningkatkan jalan lingkungan perumahan dan permukiman.

 Mendukung peningkatan sarana publik dan pemerintahan yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota sebagai pusat kegiatan.

4. Bidang Tata Ruang

- Meningkatkan dan menjaga luasan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan.
- Penyelenggaraan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan di bidang penataan ruang

5. Bidang Pembinaan Konstruksi

- Melaksanakan pembinaan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi yang seirama dengan kebijakan nasional bidang jasa konstruksi.
- Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi di daerah.
- Mengembangkan prakarsa koordinasi antara penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kapada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu – isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut menyangkut peluang dan tantangan, serta kekuatan dan kelemahan yang secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi atau mendukung tercapainya tujuan

pembangunan yang dirumuskan berdasarkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Memperhatikan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas pokok serta tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

- 1. Masih tingginya kasus stunting.
- 2. Masih belum terpenuhinya penyediaan irigasi untuk pemenuhan pertanian.
- 3. Belum tercapainya kualitas infrastruktur kota bidang pekerjaan umum.

Adapun permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan OPD terhadap masyarakat;
- 2. Masih banyaknya infrastruktur perkotaan yang belum optimal;
- 3. Masih adanya daerah rawan banjir dan genangan yang belum terselesaikan;
- 4. Masih banyaknya infrastruktur irigasi yang belum optimal;
- 5. Masih adanya infrastruktur publik dan aparatur yang belum terbangun dan terpelihara;
- 6. Belum terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten;
- 7. Masih kurangnya luasan RTH Publik.

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

G. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja serta Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan umum atas capaian kinerja dan langkah dimasa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA 20	TARGET KINERJA PADA TAHUN					UN
	100071	67 167 11 U 11 V		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	В	BB	BB	BB	A	A

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TA	RGET	KINER	JA PA[DA TAH	UN
NO	TOJOAN	JAJAKAN	KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan internal perangkat kinerja	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64,09	69,35 %	74,61 %	79,88 %	85,14 %	90,40
3	Menurunnya Angka Stunting	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	96,55	97,70	98,75	100 %	100 %	100 %
		Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	100	100	100	100 %	100 %	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TA	RGET	KINER	JA PAI	DA TAH	UN
	TOODAN	OAGAITAIT	KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan perlindungan banjir	24,34	35,24 %	44,17 %	53,19 %	61,89 %	70,07 %
		Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Lingkungan yang Berkualitas	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	57,87 %	59,85 %	61,41	63,51 %	65,68 %	67,94
		Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang baik dan merata	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	85,56 %	87,06 %	88,56	90,06	91,56	93,06
		Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatkan Penataan Bangunan Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam kondisi baik	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN					UN
	1 33 37 1114		KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	81,21 %	81,32 %	81,33	81,42 %	81,6 %	81,87 %
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang konsisten	Persentase terselenggara- nya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	66,33	70 %	78 %	90 %	98 %	100 %
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragam Hayati	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasi litas umum yang terbangun	0,042	0,044	0,046	0,047	0,049	0,051

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN
1	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan perlindungan banjir	24,34	%	Panjang Sungai yang ditangani dibagi Total Panjang sungai yang rencana akan ditangani dikali 100 %
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64,09	%	Existing tahun sebelumnya (%) + (Rencana Luas Penanganan (Ha) dibagi Luas DI (Permen 14) (Ha)) dikali 100 %
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh Rumah Tangga di Kota	96,55	%	Jumlah KK yang terlayani akses air bersih dibagi total jumlah KK dikali 100
3	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	100	%	Jumlah KK yang terlayani tangki septik dan MCK dibagi total jumlah KK dikali 100
4	Meningkatkan Pengelolaan dan	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	57,87	%	Total Panjang Saluran Drainase yang berfungsi dengan baik dibagi total

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN
	Pengembangan Sistem Drainase				panjang saluran drainase dikali 100
5	Meningkatkan Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	85,56	%	Total Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantap dibagi Total Panjang Jalan Lingkungan sesuai SK dikali 100
6	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	%	Jumlah Gedung Negara yang ditangani dibagi Jumlah Gedung Negara yang direncanakan ditangani dikali 100
7	Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	100	%	Jumlah Fasilitas Umum yang ditangani dibagi Jumlah Fasilitas yang direncanakan ditangani dikali 100
8	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	81,21	%	Jumlah panjang jalan kota dalam kondisi mantap dibagi jumlah total panjang jalan kota dikali 100%
9	Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib	100	%	Jumlah layanan Sipjaki yang tersedia dibagi 7 layanan sipjaki dikali 100%
		penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti
		konstruksi			Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan dibagi jumlah target paket pekerjaan yang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN
					dilakukan pengawasan dikali 100 %
10	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	66,33	%	Jumlah izin Penataan Ruang yang sesuai RTRW dibagi jumlah izin Penataan Ruang yang diterbitkan dikali 100%
11	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragam Hayati	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	0,042	%	Luasan RTH lingkungan perumahan dibagi fasilitas umum yang terbangun dibagi dengan luas kawasan permukiman dikali 100%

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Banjarbaru telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Dokumen terdapat pada lampiran) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan perlindungan banjir	24,34%
	•	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64,09%
2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh Rumah Tangga di Kota	96,55%
3	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	100%
4	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	57,87%
5	Meningkatkan Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	85,56%
6	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	100%
8	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	81,21%
9	Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%
10	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	66,33%
11	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragam Hayati	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	0,042%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 sebanyak 11 (sebelas) sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru , dari sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis dengan sebanyak 13 (tiga belas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	24,34	24,65	101,27
2	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	64,09	64,05	99,94
3	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh Rumah Tangga di Kota	%	96,55	97,49	100,97
4	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	%	100	100	100
5	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	57,87	58,56	101,20
6	Persentase Infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan	%	85,56	85,56	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	strategis kota dalam kondisi baik				
7	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100
8	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	%	100	100	100
9	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	81,21	81,27	100,07
10	Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	100
11	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	66,33	67,53	101,81
12	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun	%	0,042	0,042	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	5
2	Sesuai Target	6
3	Tidak Mencapai Target	1

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 8 (delapan) sasaran dan sebanyak 19 (sembilan belas) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1: "Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air"

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air

			Tahun 2021			Tahun
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD 2024
1	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	24,34	24,65	101,27	53,19
2	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	64,09	64,05	99,94	79,88
	Rata-rata Capaian Kinerja				100,60	

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu :

- 1. Persentase peningkatan perlindungan banjir
- 2. Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Sasaran 1 Indikator 1 : "Persentase peningkatan perlindungan banjir"

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air menggambarkan tindakan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air termasuk didalamnya mengurangi kawasan rawan banjir yang setiap tahunnya terjadi dengan pemeliharaaan sungai, embung/kolam retensi dan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur perlindungan banjir seperti tanggul, perkuatan tebing sungai dan embung. Ada 30 titik rawan banjir yang telah dipetakan, yang diperoleh daridata inventarisasi melalui pengukuran dan pengamatan dilapangan terhadap kejadian banjir di beberapa tahun sebelumnya, yang mana penanganan banjir tersebut tidak bisa dilakukan parsial melainkan harus menyeluruh dengan memperhatikan kondisi dari hulu ke hilir.

Indikator kinerja adalah persentase peningkatan perlindungan banjir. Indikator ini menunjukan kawasan rawan banjir yang lingkungannya akan diperbaiki dengan

infrastruktur pengendali banjir, diharapan dengan infrastruktur yang dipelihara dan dibangun tersebut banjir dapat diminimalisasi atau bahkan tidak terjadi lagi.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	24,34	24,65	101,27

Pengukuran indikator persentase peningkatan perlindungan banjir dihitung berdasarkan panjang sungai yang ditangani dengan infrastruktur pengendali banjir pada tahun ke-n dibagi dengan total panjang sungai yang akan ditangani sampai akhir 2026, kemudian dikali 100.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir adalah :

Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Tahun 2021

Indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 24,34%, telah terealisasi yaitu 24,65%. Capaian kinerjanya ini sebesar 101,27%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir

No	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Sasaran	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	55	60	24,65 101,27

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2021 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir tahun ini yaitu 24,65%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.6
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target RPJMD Tahun 2024	Target Nasional
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	24,65	53,19	1

Realisasi Persentase peningkatan perlindungan banjirtahun 2021 sebesar 24,65% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 53,19% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Keberhasilan

Untuk indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir berdasarkan cascading panjang sungai yang ditangani dengan peningkatan kondisi tebing dan tanggul serta normalisasi sungai pada Tahun 2021 adalah sepanjang 6.979 m dari total panjang sungai yang harus ditangani 126.757 m, sedangkan kondisi akhir di Tahun 2020 sebesar 18,83%, dalam pelaksanaannya pada Tahun 2021 realisasi panjang sungai yang tertangani adalah sepanjang 7.371 m sehingga capaian target menjadi 24,65%.





Gambar 3.1 Peningkatan Sungai Sumba (Paket 2)

4. Pendukung Capaian Kinerja

- a. Pencapaian indikator Persentase peningkatan perlindungan banjirdidukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan oleh bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 5,1%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase peningkatan perlindungan banjirini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai
 - b. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai

5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran kegiatan yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir tahun 2021 sebesar Rp.9.795.591.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 9.296.077.426,00 atau 94,90% dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Keuangan

Sasaran 1 Indikator 2 : "Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi"

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air menggambarkan tindakan Pemerintah Banjarbaru untuk menyelenggarakan konservasi pendayagunaan sumber daya air serta untuk menunjang produksi di sektor Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan pertanian. Umum nomor 293/KPTS/M/2014, Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Banjarbaru terdiri dari 11 (sebelas) Daerah Irigasi Permukaan.

NO	Kegiatan	PAGU	KEUANGAN		
		1700	REALISASI (Rp)	%	
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.795.591.400	9.296.077.426	94,90	
	Jumlah	Rp. 9.795.591.400	Rp.9.296.077.426	94,90	

Indikator kinerja adalah persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi. Indikator ini menunjukan luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi, diharapan dengan infrastruktur yang dibangun tersebut dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi adalah :

Tabel 3.8 Realisasi dan Capaian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	64,09	64,05	99,94

Indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 64,09%, telah terealisasi yaitu 64,05%. Capaian kinerjanya ini sebesar 99,94%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.9 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019 Realisasi / capaian	Tahun 2020 Realisasi / capaian	Tahun 2021 Realisasi / capaian
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	72,30	74,87	64,05 99,94

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2021 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun ini yaitu 64,05%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.10
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator	Realisasi	Target RPJMD	Target
	Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2024	Nasional
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64,05	79,88	-

Realisasi Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2021 sebesar 64,05% belum

mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 79,88% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Kegagalan

Untuk indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi pada akhir tahun anggaran capaian kinerja hanya 99,94% hal ini disebabkan adanya satu paket pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan sampai akhir masa pelaksanaan dengan salah satu faktor penyebabnya pada awal kontrak ada permintaan warga untuk menunda pekerjaan karena sedang masa panen dan curah hujan mulai meningkat.





Gambar 3.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bangkal (DAK Penugasan)

4. Pendukung Capaian Kinerja

- a. Pencapaian indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan oleh bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 16,54%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggarankegiatan yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2021 sebesar Rp.9.574.419.250,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 7.990.780.300,00 atau 83,46% dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Keuangan

NO	NO Kegiatan	PAGU	KEUANGAN		
		17.00	REALISASI (Rp)	%	
1	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.574.419.250	7.990.780.300	83,46	
	Jumlah	Rp. 9.574.419.250	Rp. 7.990.780.300	83,46	

Sasaran 2 : "Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum"

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

			Tahun 2021			Tahun
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD 2024
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	96,55	97,15	100,62	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				100,62	

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu:

 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota

Sasaran 2 Indikator 1 : "Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota"

SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) adalah suatu sistem yang mengurusi proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku (kualitas & kuantitas), transmisi air baku dari intake (sumber air baku) ke instalasi pengolahan air (IPA), teknologi Instalasi Pengolahan Air/ IPA yang efektif dari segi performance dan biaya, transmisi air olahan (air minum) dari lokasi IPA ke reservoir (offtake), sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan. Hal-hal teknis maupun administrasi yang terkait dengan proses penyediaan air minum dimasukkan dalam sistem pengelolaan SPAM.

Indikator kinerja adalah Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

terhadap seluruh rumah tangga di Kota. Indikator ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota adalah :

Tabel 3.13 Realisasi dan Capaian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	96,55	97,15	100,62

Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 96,55%,telah terealisasi yaitu 97,15%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100,62%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.14 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019 Realisasi / capaian	Tahun 2020 Realisasi / capaian	Tahun 2021 Realisasi / capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	91,24	94,50	97,15 100,62

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2021 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kotatahun ini yaitu 97,15%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.15
Perbandingan RPJMD dan Nasional

N	0	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target RPJMD Tahun 2024	Target Nasional
1		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	97,15	100	96,55

Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota tahun 2021 sebesar 97,15% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100% dan melebihi target nasional dengan capaian 100,62%.

3. Analisis Keberhasilan

Untuk indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota pada akhir tahun anggaran capaian kinerja 100% hal ini disebabkan masyarakat Kota Banjarbaru bersedia untuk berlangganan jaringan PDAM, dimana jaringan PDAM adalah merupakan salah satu akses aman terhadap air minum.



Gambar 3.3 Pengembangan Jaringan Distribusi Air dan Sambungan Rumah Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang

4. Pendukung Capaian Kinerja

- a. Pencapaian indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota didukung oleh Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilaksanakan oleh bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 11,9%. Sedangkan untuk mendukung

capaian indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota tahun 2021 sebesar Rp.4.074.128.000,00 dantelah direalisasikan sebesar Rp. 3.589.391.800,00 atau 88,10% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.16 Realisasi Keuangan

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
	1100101111	17.00	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.074.128.000	3.589.391.800	88,10
	Jumlah	Rp. 4.074.128.000	Rp.3.589.391.800	88,10

Sasaran 3 : "Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah"

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

				Tahun 2021		
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	2024
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	%	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			100		

Sasaran kinerja Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota

Sasaran 3 Indikator 1 : "Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota"

Secara umum limbah domestik yang berasal dari rumah tangga dan yang tidak memiliki akses terhadap bangunan pengolahan merupakan sumber pencemaran utama bagi lingkungan yang dapat menimbulkan dampak yang serius karena dapat dengan mudah masuk ke badan air atau pun meresap ke badan tanah. Fakta dilapangan menunjukkan, air limbah domestik ini merupakan sumber utama pencemar badan air lingkungan terutama di daerah perkotaan.

Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa

unit pengolahan setempat (tangki septik/MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota adalah :

Tabel 3.18
Realisasi dan Capaian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	%	100	100	100

Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota berdasarkan target yang telah ditentukanyaitu 100%,telah terealisasi yaitu 100%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.19 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir

	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
No	Sasaran	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	99,16	100	100 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2021 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik kota tahun ini yaitu 100%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.20
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target RPJMD Tahun 2024	Target Nasional
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	100	100	100

Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota tahun 2021sebesar 100%, realisasi ini mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100% dan mecapai target nasional dengan capaian 100%.

3. Analisis Keberhasilan

Untuk Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik kota pada akhir tahun anggaran capaian kinerja 100% hal ini dikarenakan akses layak dan akses aman sudah mencapai 100%.







Gambar 3.4
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Bangkal Kec. Cempaka

4. Pendukung Capaian Kinerja

- a. Pencapaian indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota didukung oleh Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang dilaksanakan oleh bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- sumber daya b. Penggunaan keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi penggunaannya sebesar 1,35%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:
 - 1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air LimbahDomestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik kota tahun 2021 sebesar Rp.5.276.082.000,00 dantelah direalisasikan sebesar Rp. 5.205.096.000,00 atau 98,65% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.21 Realisasi Keuangan

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
	11100101	17.00	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengelolaan	5.276.082.000	5.205.096.000	98,65
	Dan Pengembangan			
	Sistem Air Limbah			
	Jumlah	Rp. 5.276.082.000	Rp.5.205.096.000	98,65

Sasaran 4 : "Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase"

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.22

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

		_		Tahun		
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD 2024
1	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	57,87	58,56	101,20	63,51
	Rata-rata Capaian Kinerja			100,21		

Sasaran kinerja Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase saluran drainase yang berfungsi baik

Sasaran 4 Indikator 1 : "Persentase saluran drainase yang berfungsi baik"

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase menggambarkan kondisi saluran drainase jalan kota dan drainase jalan lingkungan yang telah dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2021 sebagai implementasi dari perencanaan yang telah tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Meningkatnya persentase saluran drainase yang berfungsi baik diukur berdasarkan hasil dari panjang drainase jalan kota dan drainase jalan lingkungan yang berfungsi baik (sampai dengan tahun 2021) dibagi total target panjang drainase jalan kota (2 kali panjang jalan kota) berdasar draft SK Inventaris Jalan Tahun 2021.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik adalah:

Tabel 3.23 Realisasi dan Capaian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	57,87	58,56	101,20

Indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 57,87%, telah terealisasi yaitu 58,56%. Capaian kinerjanya ini sebesar 101,20%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.24 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019 Realisasi / capaian	Tahun 2020 Realisasi / capaian	Tahun 2021 Realisasi / capaian
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	89,91	71,70	58,56 101,20

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2021 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik tahun ini yaitu 58,56%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.25
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target RPJMD Tahun 2024	Target Nasional
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	58,56	63,51	-

Realisasi Persentase saluran drainase yang berfungsi baiktahun 2021sebesar 58,56%belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 63,51% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan untuk capaian kinerja dengan target indikator Persentase Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik, yang merupakan gabungan antara 2 indikator target yaitu "Persentase Saluran Drainase Jalan Kota yang Berfungsi Baik dan Persentase Saluran Drainase Jalan Lingkungan yang Berfungsi Baik", yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan dan dilaksanakan oleh 2 Bidang (Bina Marga dan Cipta Karya), dikarenakan adanya perhatian dari Pemerintah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik dengan memberikan tambahan pagu anggaran melalui APBD Perubahan 2021 untuk Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sehingga realisasi/output pada sub kegiatan tersebut (6.898 m) melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra/Cascading (4.441 m).







Gambar 3.5 Pembangunan Drainase Komplek Asabri RT. 18 RW. 04 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara

4. Pendukung Capaian Kinerja

- a. Pencapaian indikatorPersentase saluran drainase yang berfungsi baikdidukung oleh ProgramPengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang dilaksanakan oleh bidang Bina Marga dan bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 8,59%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baikini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1. ProgramPengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
 - c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
 - d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan

5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik tahun 2021 sebesar Rp.34.131.604.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 31.201.322.500,00 atau 91,41% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.26 Realisasi Keuangan

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN		
	T NOOTAIII	1700	REALISASI (Rp)	%	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	34.131.604.000	31.201.322.500	91,41	
	Jumlah	Rp. 34.131.604.000	Rp.31.201.322.500	91,41	

Sasaran 5 : "Meningkatnya Pengembangan Permukiman"

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.27 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Pengembangan Permukiman

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun
No.			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD 2024
1	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	85,56	85,56	100	90,06
	Rata-rata Capaian Kinerja				100	

Sasaran kinerja Meningkatnya Pengembangan Permukiman dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik

Sasaran 5 Indikator 1 : "Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik"

Meningkatnya kemantapan jalan lingkungan menggambarkan kondisi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang telah terbangun dan yang telah dipelihara oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2021 sebagai implementasi dari perencanaan yang telah tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Meningkatnya kemantapan jalan lingkungan diukur berdasarkan hasil dari panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dan sedang (sampai dengan tahun 2021) dibagi total panjang jalan dengan status ruas jalan lingkungan dikali 100%.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja meningkatnya pengembangan permukiman dengan indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik adalah :

Tabel 3.28 Realisasi dan Capaian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	85,56	85,56	100

Indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik berdasarkan target yang telah ditentukanyaitu 85,56%, telah terealisasi yaitu 85,56%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.29 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019 Realisasi / capaian	Tahun 2020 Realisasi / capaian	Tahun 2021 Realisasi / capaian
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	82,36	76,05	85,56 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2021 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baiktahun ini yaitu 85,56%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.30
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator	Realisasi	Target RPJMD	Target
	Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2024	Nasional
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	85,56	90,06	-

Realisasi Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik tahun 2021 sebesar 85,56% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 90,06% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan untuk capaian kinerja dengan target Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dikarenakan adanya perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang di tentukan yaitu sepanjang 21.779 m.

4. Pendukung Capaian Kinerja

- a. Pencapaian indikator Realisasi Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik didukung oleh ProgramPengembangan Permukimanyang dilaksanakan oleh bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 7,02%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baikini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1. Program Pengembangan Permukiman
 - Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

 a. Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik tahun 2021 sebesar Rp.28.373.719.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 28.236.553.600,00 atau 92,98% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.31 Realisasi Keuangan

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN		
	T NOOTO-IIII	1700	REALISASI (Rp)	%	
1	Program Pengembangan Permukiman	28.373.719.000	39.681.692.000	92,98	
	Jumlah	Rp. 28.373.719.000	Rp.39.681.692.000	92,98	

Sasaran 6: "Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung"

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.32
Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung

	Indikator Kinerja	Satuan		Tahun		
No.			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD 2024
1	Persentase Gedung Negara Milik Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				100	

Sasaran kinerja Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik

Sasaran 6 Indikator 1 : "Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik"

Meningkatnya Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik melalui kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Banjarbaru dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Banjarbaru dan mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota bertujuan agar dapat menambah fasilitas perkantoran dan fasilitas umum di Kota Banjarbaru yang lebih baik dan sesuai dengan Standar

Indikator Persentase Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik dihitung berdasarkan hasil dari jumlah paket yang direncanakan pada kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota dibagi jumlah paket yang terlaksana dikali 100%.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja meningkatnya penataan bangunan gedung dengan indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik adalah :

Tabel 3.33 Realisasi dan Capaian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100

Indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik berdasarkan target yang telah ditentukanyaitu 100%,telah terealisasi yaitu 100%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.34 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir

	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
No	Sasaran	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	100	100 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2021 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baiktahun ini yaitu 100%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.35
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target RPJMD Tahun 2024	Target Nasional
1.	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	100	-

Realisasi Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baiktahuntahun 2021sebesar 100%, realisasi ini mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan untuk capaian kinerja dengan target indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik dikarenakan pada Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota semua pekerjaan pembanguan terselesaikan tepat waktu.





Gambar 3.5 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

4. Pendukung Capaian Kinerja

- a. Pencapaian indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baiktahun didukung oleh ProgramPenataan Bangunan Gedungyang dilaksanakan oleh bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 1,42%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baikini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1. Program Penataan Bangunan Gedung
 - I. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik tahun 2021 sebesar Rp.19.034.639.438,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 18.763.570.238,00 atau 98,58% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.36 Realisasi Keuangan

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
	TROCKAIII TAGO		REALISASI (Rp)	%
1	Program Penataan Bangunan Gedung	19.034.639.438	18.763.570.238	98,58
Jumlah		Rp. 19.034.639.438	Rp.18.763.570.238	98,58

Sasaran 7 : "Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya"

Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.37
Analisis Pencapaian Sasaran 7
Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya

			Tahun 2021			Tahun
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD 2024
1	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	%	100	100	100	100
	Rata	100				

Sasaran kinerja Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik

Sasaran 7 Indikator 1 : "Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Yang Tertata Baik"

Meningkatnya Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik melalui kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan diharapkan dapat meningkatkan prasarana fasilitas umum berupa Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan, sehingga dapat digunakan secara maksimal oleh pengguna.

Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan bertujuan agar dapat menambah fasilitas umum di Kota Banjarbaru yang lebih baik dan sesuai dengan Standar.

Indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik dihitung berdasarkan hasil dari jumlah paket yang direncanakan pada kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan dibagi jumlah paket yang terlaksana dikali 100%.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik adalah :

Tabel 3.38 Realisasi dan Capaian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	%	100	100	100

Indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi yaitu 100%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.39 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir

	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
No	Sasaran	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	87,82	99,70	100 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2021 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik ini yaitu 100%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.40
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator	Realisasi	Target RPJMD	Target
	Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2024	Nasional
1.	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	100	100	-

Realisasi Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik tahun 2021 sebesar 100%, realisasi ini mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan untuk capaian kinerja dengan target indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik dikarenakan perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi selesai tepat waktu.

4. Pendukung Capaian Kinerja

a. Pencapaian indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baiktahun didukung oleh ProgramPenataan Bangunan Dan

- Lingkungannyayang dilaksanakan oleh bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 20,29%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baikini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - I. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik tahun 2021 sebesar Rp. 2.364.330.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.884.514.500,00 atau 79,71% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.41 Realisasi Keuangan

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
	17.00		REALISASI (Rp)	%
1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.364.330.000	1.884.514.500	79,71
Jumlah		Rp. 2.364.330.000	Rp.1.884.514.500	79,71

Sasaran 8 : "Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan"

Pencapaian sasaran 8 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.42 Analisis Pencapaian Sasaran 8 Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan

		Tahun 2021			Tahun	
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD 2024
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	81,21	81,27	100,07	81,24
	Rata-rata Capaian Kinerja				100,07	

Sasaran kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu:

1. Tingkat Kemantapan Jalan Kota

Sasaran 8 Indikator 1 : "Tingkat Kemantapan Jalan Kota"

Meningkatnya kemantapan jalan kota menggambarkan kondisi jalan dan jembatan yang telah terbangun dan yang telah dipelihara oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2021 sebagai implementasi dari perencanaan yang telah tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Meningkatnya kemantapan jalan kota diukur berdasarkan hasil dari panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (sampai dengan tahun 2021) dibagi total panjang jalan dengan status ruas jalan kota dikali 100.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja meningkatnya penyelenggaraan jalan dengan indikator tingkat kemantapan jalan kota adalah :

Tabel 3.43
Realisasi dan Capaian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kemantapan Jalan kota	%	81,21	81,27	100,07

Indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kota berdasarkan target yang telah ditentukanyaitu 81,21%, telah terealisasi yaitu 81,27%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100,07%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.44 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir

No		Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Sasaran	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
	1.	Tingkat Kemantapan Jalan kota	96,94	96,94	81,27 100,07

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2021 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kota tahun ini yaitu 81,27%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.45
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator	Realisasi	Target RPJMD	Target
	Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2024	Nasional
1.	Tingkat Kemantapan Jalan kota	81,27	81,24	-

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan kotatahun 2021 sebesar 81,27% realisasi ini melebihi target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 81,24% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Keberhasilan

Program Penyelenggaraan Jalan memiliki indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kota. Realisasi untuk indikator tersebut diukur dari capaian output 6 (enam)

sub kegiatan yaitu Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Rehabilitasi Jembatan. Keberhasilan capaian kinerja dari program ini dikarenakan adanya perhatian dari Pemerintah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kemantapan jalan kota dengan memberikan tambahan pagu anggaran melalui ABPB Perubahan 2021 untuk sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sehingga realisasi/output pada sub kegiatan tersebut (3.653 m) melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra/Cascading (2.744 m) serta pada sub kegiatan Pembangunan Jalan terdapat realisasi/output yang menunjang pencapaian target tingkat kemantapan jalan kota (6.338 m).





Gambar 3.6
Peningkatan Jalan Tambak Buluh (lanjutan) Kel. Landasan Ulin Timur (DAK Reguler Paket 1)

4. Pendukung Capaian Kinerja

- a. Pencapaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan kota didukung oleh Program Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan oleh bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 6,2%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan kota ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1. Program Penyelenggaraan Jalan
 - I. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 - b. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Tingkat Kemantapan Jalan kota tahun 2021 sebesar Rp.42.305.444.845,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 39.681.692.000,00 atau 93,80% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.46
Perbandingan RPJMD dan Nasional

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN		
	7 110 010	17.00	REALISASI (Rp)	%	
1	Program Penyelenggaraan Jalan	42.305.444.845	39.681.692.000	93,80	
Jumlah		Rp. 42.305.444.845	Rp.39.681.692.000	93,80	

Sasaran 9: "Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi"

Pencapaian sasaran 9 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.47
Analisis Pencapaian Sasaran 9
Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi

				Tahun		
No. Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD 2024	
1	Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib	%	100	100	100	100

	Indikator Kinerja			Tahun 2021	Tahun	
No.		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD 2024
	pemanfaatan jasa konstruksi					
	Rata-rata Capaian Kinerja			100		

Sasaran kinerja Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu:

 Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

Sasaran 9 Indikator 1 : "Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi"

Meningkatnya pembinaan dan pengawasaan usaha jasa konstruksi menggambarkan penilaian kinerja yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasaan layanan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru. Meningkatnya pengawasan usaha jasa konstruksi di ukur berdasarkan persentase layanan informasi jasa konstruksi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksidengan indikator Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi adalah :

Tabel 3.48 Realisasi dan Capaian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------	--------	--------	-----------	---------

Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	100
---	---	-----	-----	-----

Indikator Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi yaitu 100%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.49 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019 Realisasi / capaian	Tahun 2020 Realisasi / capaian	Tahun 2021 Realisasi / capaian
1.	Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100	100	100 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2021 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksitahun ini yaitu 100%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.50
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator	Realisasi	Target RPJMD	Target
	Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2024	Nasional

1.	Persentase layanan informasi	100	100	-
	dan rekomendasi teknis serta			
	pengawasan terhadap tertib			
	usaha, tertib penyelenggaraan			
	dan tertib pemanfaatan jasa			
	konstruksi			

Realisasi Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tahun tahun 2021 sebesar 100%, realisasi ini mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Keberhasilan

Program Pengembangan Jasa Konstruksi memiliki indikator Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dikarenakan

4. Pendukung Capaian Kinerja

- a. Pencapaian indikator Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi didukung oleh Program Pengembangan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh bidang Pengembangan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 6,24%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
 Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
 - a. Sub Kegiatan Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
- III. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
 Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi kota tahun 2021 sebesar Rp.144.844.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 135.848.000,00 atau 93,76% dengan rincian per program sebagai berikut:

Tabel 3.51 Realisasi Keuangan

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
	T ROOTO IIII	17.00	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	144.844.500	135.848.000	93,76
	Jumlah	Rp. 144.844.500	Rp.135.848.000	93,76

Sasaran 10 : "Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang"

Pencapaian sasaran 10 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.52
Analisis Pencapaian Sasaran 10
Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang

			Tahun 2021			Tahun
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD 2024
1	Persentase	%	66,33	67,53	101,81	90
	terselenggaranya					
	penataan ruang					
	sesuai dengan					
	Rencana Tata					
	Ruang Wilayah					
	(RTRW)					
	5 /				404.04	
	Rata-rata Capaian Kinerja				101,81	

Sasaran kinerja Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu:

 Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sasaran 10 Indikator 1 : "Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)"

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang

wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruangdengan indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah :

Tabel 3.53 Realisasi dan Capaian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	66,33	67,53	101,81

Indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)berdasarkan target yang telah ditentukanyaitu 66,33%,telah terealisasi yaitu 67,53%. Capaian kinerjanya ini sebesar 101,81%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.54
Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir

	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
No I	Sasaran	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	100	100	67,53 101,81

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2021 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)tahun ini yaitu 67,53%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.55
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator	Realisasi	Target RPJMD	Target
	Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2024	Nasional
1.	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	67,53	90	-

Realisasi Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)tahun 2021sebesar 67,53%,realisasi ini belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 90% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Keberhasilan

Untuk Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Realisasi untuk indikator tersebut diukur dari capaian output 3 (tiga) sub kegiatan yakni Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Invesatasi dan Pembangunan Daerah capaian kinerja 100%.

4. Pendukung Capaian Kinerja

a. Pencapaian indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didukung oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar 17,3%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - I. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan
 Penataan Ruang
 - II. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - III. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran awal program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota tahun 2021 sebesar Rp.1.599.446.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.322.668.480,00 atau 82,70% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.56 Realisasi Keuangan

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
	T NOOKAIII	1700	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.599.446.500	1.322.668.480	82,70
	Jumlah	Rp. 1.599.446.500	Rp.1.322.668.480	82,70

Sasaran 11 : "Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati"

Pencapaian sasaran 11 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.57
Analisis Pencapaian Sasaran 11
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun
No.			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD 2024
1	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/ fasilitas umum yang terbangun	%	0,042	0,042	100	0,047
	Rata-rata Capaian Kinerja			100		

Sasaran kinerja Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu:

Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/ fasilitas umum yang terbangun

Sasaran 11 Indikator 1 : "Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/ fasilitas umum yang terbangun"

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open space) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau (RTH) dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan.

Penyediaan ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan menurut pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan terbagi menjadi RTH Publik

dan RTH privat. Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) yang sesuai adalah 30% dari keseluruhan luas lahan/wilayah suatu daerah.

Oleh karenanya untuk mendukung program tersebut diimpelentasikan melalui kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) sub kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan menambah luasan ruang terbuka hijau perkotaan (RTHKP) Kota Banjarbaru dan sebagai ruang publik hijau dan sehat bagi masyarakat lingkungan perumahan.

Contoh perhitungan:

Luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun dibagi dengan luas kawasan permukiman dikali 100 %

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan indikator Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/ fasilitas umum yang terbangun adalah:

Tabel 3.58 Realisasi dan Capaian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/ fasilitas umum yang terbangun	%	0,042	0,042	100

Indikator Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/ fasilitas umum yang terbangun berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 0,042%, telah terealisasi yaitu 0,042%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3.59 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir

No	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Sasaran	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/	10,43	10,28	0,042

fasilitas umum yang		100
terbangun		

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir hanya bisa dilihat dari realisasi tahun 2021 saja dikarenakan pada tahun 2021 berbeda indikator. Realisasi kinerja indikator Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/ fasilitas umum yang terbangun tahun ini yaitu 0,042%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3.60
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator	Realisasi	Target RPJMD	Target
	Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2024	Nasional
1.	Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/ fasilitas umum yang terbangun	0,042	0,047	-

Realisasi Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/ fasilitas umum yang terbangun tahun 2021sebesar 0,042%,realisasi ini belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 0,047% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Keberhasilan

Untuk keberhasilan Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/ fasilitas umum yang terbangun ini dikarenakan terlaksananya pengadaan/penyediaan tanah untuk ruang terbuka hijau di tiap tahunnya dan berdampak pada pertambahan luasan RTH Publik di kota banjarbaru.

4. Pendukung Capaian Kinerja

- a. Pencapaian indikator Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/ fasilitas umum yang terbangundidukung oleh Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang dilaksanakan oleh bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar

2,85%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/ fasilitas umum yang terbangun ini dilaksanakaan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - I. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/ fasilitas umum yang terbangun kota tahun 2021 sebesar Rp.2.421.927.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.352.890.050,00 atau 97,15% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.61 Realisasi Keuangan

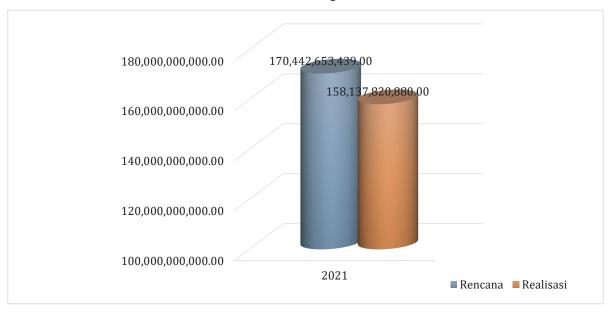
NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
	T NOOTONIII	1700	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.421.927.500	2.352.890.050	97,15
	Jumlah	Rp. 2.421.927.500	Rp. 2.352.890.050	97,15

B. Realisasi Anggaran

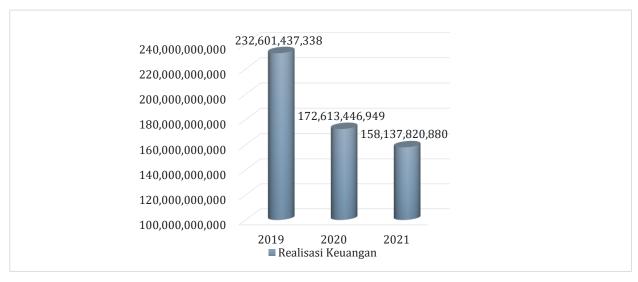
Selama tahun 2021 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun 2021 dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 154.407.350.737,00 dan mengalami perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Banjarbaru adalah sebesar Rp.

170.442.653.439,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.158.137.820.880,00 atau dengan serapan dana APBD-P mencapai 92,78%.

Grafik 3.1 Persentase Realisasi Keuangan Tahun 2020



Grafik 3.2 Persentase Realisasi Keuangan per Tahun



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru adalah 5 (lima) sasaran berkategori *Melebihi Target* dan 6 (enam) sasaran berkategori *Sesuai Target*. Dengan demikian rata-rata capaian sasaran keseluruhan berkategori *Melebihi Target*.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 170.442.653.439,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 158.137.820.880,00 atau dengan serapan dana APBD-P

mencapai 92,78%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Banjarbaru.

B. Langkah Masa Datang

Untuk pelaksanaan kinerja dinas pada tahun 2021, pada umumnya seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi untuk mencapai hasil yang ideal memang perlu SDM yang sesuai dengan bidang dan tugasnya agar mudah berkomunikasi dalam pelasanaannya, untuk itu kami telah melakukan langkah-langkah yang berkesinambungan, diantara lain:

- Meningkatkan infrasruktur perlindungan banjir dengan tipe konstruksi yang lebih terjaga mutunya, mudah metode pelaksanaannya serta relatif cepat pelaksanaannya sehingga memaksimalkan umur konstruksi dan meminimalisasi terjadinya penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- 2. Melalukan perkuatan/peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk lebih memaksimalkan kinerja jaringan irigasi dan meminimalisir biaya pemeliharaan.
- 3. Melaksanakan lebih banyak lagi jalan kota yang dibangun yaitu dengan membuka jalan-jalan penghubung yang belum terkoneksi dengan jalan-jalan kota sesuai Rencana Umum Jaringan Jalan dan melaksanakan perbaikan kerusakan jalan-jalan kota yang makin banyak bisa tertangani.
- 4. Melaksanakan lebih banyak lagi saluran-saluran drainase di Kota Banjarbaru yang dibangun dan dipelihara melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- 5. Melaksanakan perbaikan kerusakan jalan-jalan lingkungan yang makin banyak agar bisa tertangani.
- 6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi agar lebih tertib terhadap tertib usaha, tertib penyelenggraan dan tertib pemanfaatan jasa

konstruksi.

- 7. Melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Kota Banjarbaru dari tahun 2022 hingga tahun 2024 dimulai dengan penyusunan Peta Dasar dan Peta Tematik Skala 1:5.000 di tahun anggaran 2022.
- 8. Meningkatkan luasan rth publik dengan membangun ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan perumahan/fasilitas umum perumahan.